

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 mengenai “Pemerintah Daerah” yang ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan representasi sebuah hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom guna menyusun dan memelihara hal-hal yang menyangkut pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam daerah tersebut dengan mandiri berdasarkan sistem NKRI. Kemudian, pemerintah daerah juga dinilai sebagai salah satu lembaga negara yang mengurus akuntansi publik.

Otonomi daerah diharapkan akan mampu membantu mengembangkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, salah satu faktor tumbuhnya ekonomi daerah dapat ditinjau dari kalkulasi level kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga produk yang konsisten. Harga konstan dari PDRB tersebut dihitung berdasarkan tahun dasar. Dengan munculnya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan dari pembangunan perekonomian.

Desentralisasi fiskal dalam ranah ini secara langsung menghibahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerah tersebut secara mandiri agar mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan asli. Dengan demikian, PAD dinilai memiliki value yang tinggi dimana hal tersebut digunakan dalam memilih atau menentukan tingkatan kinerja keuangan dalam daerah otonom sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah berasal dari PAD yang mencakup hasil pajak, retribusi, output dari pengelolaan sumber daya daerah yang masing-masing dikategorikan dalam pendapatan asli daerah yang konkret dan sah.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 13 yang ditetapkan pada Tahun 2006 mencakup secara keseluruhan pengeluaran rekening kas umum suatu daerah dimana hal itu berpengaruh dalam berkurangnya ekuitas dana lancar sebagai kewajiban daerah dalam tahun anggaran. Perwujudan belanja daerah di bagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan tidak langsung serta dengan semakin meningkatnya intensitas belanja daerah maka hal tersebut dapat berdampak untuk pengembangan.

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dimana hal itu digolongkan sebagai angkatan kerja dengan usia minimal 15 tahun sebagai pekerja. Perbandingan dari jumlah angkatan pekerja dan jumlah penduduk usia kerja menghasilkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah sebuah indikator dari kebijakan yang diterapkan untuk mengukur kuantitas angkatan kerja aktif mencari pekerjaan dan bekerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan, jika PDRB seringkali mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika situasi perekonomian menurun maka pendapatan juga mengalami kemunduran yang mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat. Kemiskinan sendiri adalah situasi ketika individu tidak mampu atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dimana hal ini telah menjadi persoalan yang complex dan masih sulit diselesaikan hampir di semua daerah. Kemiskinan dapat dilihat dari garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan per bulannya di bawah garis kemiskinan, maka individu tersebut disebut dengan penduduk miskin. Salah satu indikator kemiskinan meliputi persentase penduduk miskin.

Berdasarkan penelitian terkait oleh Siregar dengan judul “*PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PDRB DI KOTA PEMATANGSIANTAR*” yang ditulis oleh Siregar (2019). Dalam penelitian tersebut, (Siregar, 2019) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap PDRB akan tetapi memiliki tingkat efisiensi yang tidak terlalu tinggi jika lihat dari nilai koefisien (0.407702) dan nilai probabilitas sebesar $0.0605 >$ dengan tingkat signifikansi α (0,05).

Kemudian, studi dengan judul “*PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2004-2013*” oleh (Samual, Koleangan, & Lapihan, 2016) menjelaskan bahwa belanja daerah dinilai memiliki influensi positif dan signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien regresi belanja daerah tersebut sendiri menunjukkan positivitas dengan angka 5,162 serta jika belanja daerah meningkat sebesar 1% maka PDRB akan naik juga sebesar 5,162%.

Penelitian dengan judul “*Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto*” yang disusun oleh Mulyasari (2016). Kemudian, (Mulyasari, 2016) menjelaskan bahwa kerja memiliki positivitas yang berpengaruh dan mempunyai nilai signifikansi pada $\alpha = 5\%$ kepada PDRB dengan nilai koefisien regresi pada angkatan kerja ditemukan tanda positif sebesar 0,273645 dengan p-value sebesar 0,0000, dengan kata lain jika setiap nilai kenaikan angkatan kerja minimal 1% maka PDRB akan ikut naik sebesar 0,273645%.

Penelitian yang dilakukan oleh (WIDOWATI, 2019) yang meneliti tentang “*ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT KEMISKINAN DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP PDRB DI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017*”. Berdasarkan penelitian tersebut, (Widowati, 2019) mengatakan bahwa Tingkat Kemiskinan membawa pengaruh negative dan signifikansi yang tinggi terhadap PDRB. Dengan koefisien regresi sebesar -0,002229. (Widowati, 2019) menambahkan bahwa Tingkat Kemiskinan mengandung pola relasi Logaritma-Linier dengan PDRB, oleh sebab itu jika Tingkat Kemiskinan naik 1% maka akan menyebabkan penurunan PDRB sebesar 0,22 jiwa.

Berdasarkan kajian masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA DAERAH, ANGKATAN KERJA, KEMISKINAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PERIODE 2017 - 2020**”.

I.2 Teori Pengaruh

I.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Rosidin, 2015), sejak ditetapkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, tiap daerah diharuskan untuk meningkatkan efisensi dan signifikansi PAD guna mendanai kebutuhan daerahnya sendiri dengan pemerintah daerah yang diharapkan untuk mampu menggali sumber-sumber daya alam dan potensi daerah sebagai keuangan khusus sebagai media pembiayaan kebutuhan pemerintah dan pembangunan yang terpenuhi oleh daerah tersebut melalui PAD.

(Rosidin, 2015) menambahkankan bahwa dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang didapat melalui dan berdasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan semakin tingginya kontribusi PAD maka akan semakin tinggi pula abilitas pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggaraan desentralisasi yang dimana suatu daerah dapat diartikan sebagai aksi menyelenggarakan desentralisasinya dengan baik ditinjau dari penjumlahan nilai PAD terhadap total pendapatan yang telah diperoleh.

Berdasarkan (Siregar, 2019), ia menyatakan bahwa PAD memiliki nilai positivitas terhadap PDRB akan tetapi nilai tersebut tidak tinggi, kemudian hal tersebut merepresentasikan sebagaimana semakin naiknya PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan sernakin meningkat pula nilai PDRB pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan dan maksimalkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.

I.2.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut PSAP No.2 dalam (Erlina & Mulyani, 2007), belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menurunkan angka saldo anggaran yang terus meninggi dari tahun ke tahun dengan anggaran yang bersangkutan tidak dapat memperoleh pembayaran kembali. Menurut (Rosidin, 2015), kebutuhan pemerintah dan masyarakat di masing-masing daerah meningkat dengan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Samual, Koleangan, & Lopian, 2016), Belanja Daerah membawa influensi positif dan signifikan pada PDRB daerah, demikian halnya Belanja Daerah yang berpengaruh langsung pada PDRB dimana semakin besar nilai Belanja Daerah yang dialokasikan pada kegiatan pengembangan ekonomi maka nilai PDRB secara keseluruhan akan meningkat.

I.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Kuncoro, 2006), disebutkan bahwa akumulasi angkatan kerja merupakan implementasi dari kesempatan kerja yang ada di lapangan, dengan kata lain semakin meningkatnya lapangan kerja yang ada, maka akan semakin besar juga total produktivitas suatu daerah.

(Tadoro & Smith, 2011) menjelaskan bahwa perkembangan Angkatan Kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor produktif dan positif yang memacu ekonomi untuk berkembang sebagaimana semakin banyak angkatan kerja maka semakin besar tingkat produtivitas yang dapat dihasilkan dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Teori neoklasik dalam (Tadoro & Smith, 2011), dijelaskan sebagaimana angkatan kerja yang bekerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagaimana pandangan kaum neoklasik dimana kemajuan aspek kualitas buruh difungsikan untuk meningkatkan angka pendapatan lebih guna meningkatkan permintaan masyarakat terhadap konsumsi produk atau jasa tertentu.

Sedangkan (Mulyasari, 2016) menyatakan bahwa angkatan kerja mempunyai pengaruh dalam meningkatkan positivitas PDRB yang artinya semakin tinggi penyerapan angkatan kerja maka intensitas dari nilai PRDB akan meningkat juga.

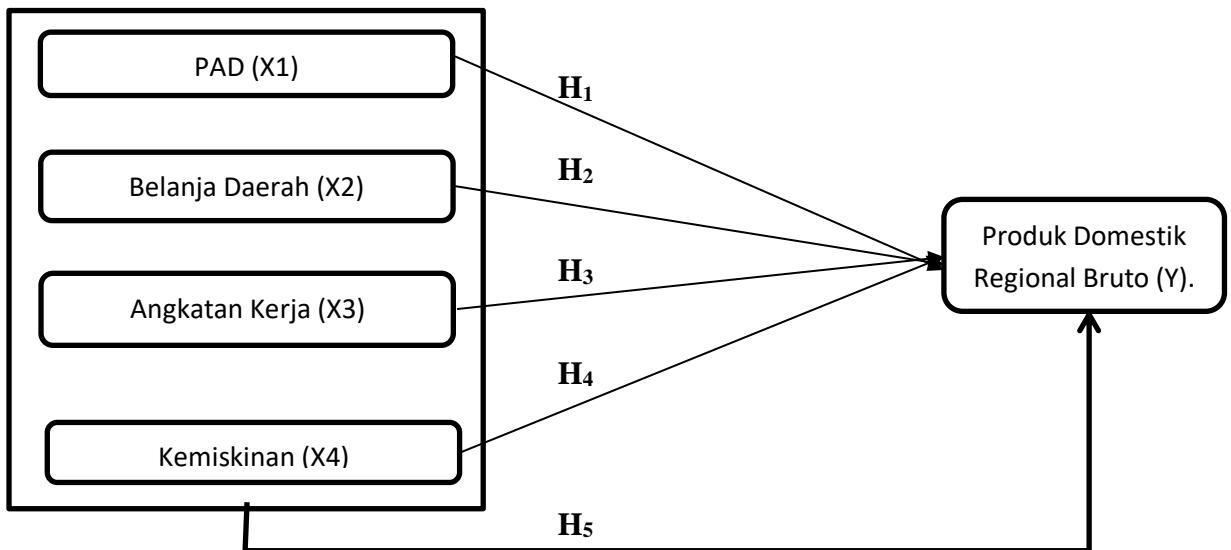
I.2.4 Pengaruh Kemiskinan terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Friedman dalam (Kuncoro, 2006), kemiskinan merupakan ketidasetaraan nilai kesempatan untuk membentuk kekuasaan sosial dalam bentuk asset, sumber keuangan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang artinya kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi standar hidup minimum. Dalam sirkulasi tersebut, kemiskinan dinilai dapat mempengaruhi tujuan atau laju jalannya perekonomian dimana hal tersebut disebabkan oleh angka kemiskinan yang terus meningkat menciptakan situasi yang mengakibatkan rakyat miskin kehilangan akses untuk melakukan pinjaman kredit, pendidikan, dan kehilangan kesempatan berinvestasi dalam bentuk fisik atau moneter serta merujuk pada akibat angka perkembangan PDRB yang rendah. Menurut (Widowati, 2019), kemiskinan membawa efek yang sangat buruk bagi PRDB dan dengan semakin meningkatnya populasi rakyat miskin maka PDRB akan menurun.

I.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori serta penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, dapat di gambarkan suatu kerangka yang konseptual seperti dibawah ini:

**Gambar I.1
Kerangka Konseptual**



I.4 Hipotesis Penelitian

H1: Dalam lingkup parsial, PAD dinilai mempengaruhi PDRB di Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020.

H2: Secara parsial Belanja Daerah memiliki pengaruh terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020.

H3: Secara parsial Angkatan Kerja mempengaruhi PDRB di Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020.

H4: Secara parsial Kemiskinan memiliki pengaruh terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020.

H5 : Secara simultan PAD, Belanja Daerah, Angkatan Kerja dan Kemiskinan memiliki pengaruh terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020